

**PERANAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

OLEH:

MARLINA SINAGA

NPM 148520026



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**PERANAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata
I (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH :
MARLINA SINAGA
NPM : 148520026



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Nama : MARLINA SINAGA

NPM : 14 852 0026

Fakultas : Isipol

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing I


Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd
Pembimbing II

Mengetahui

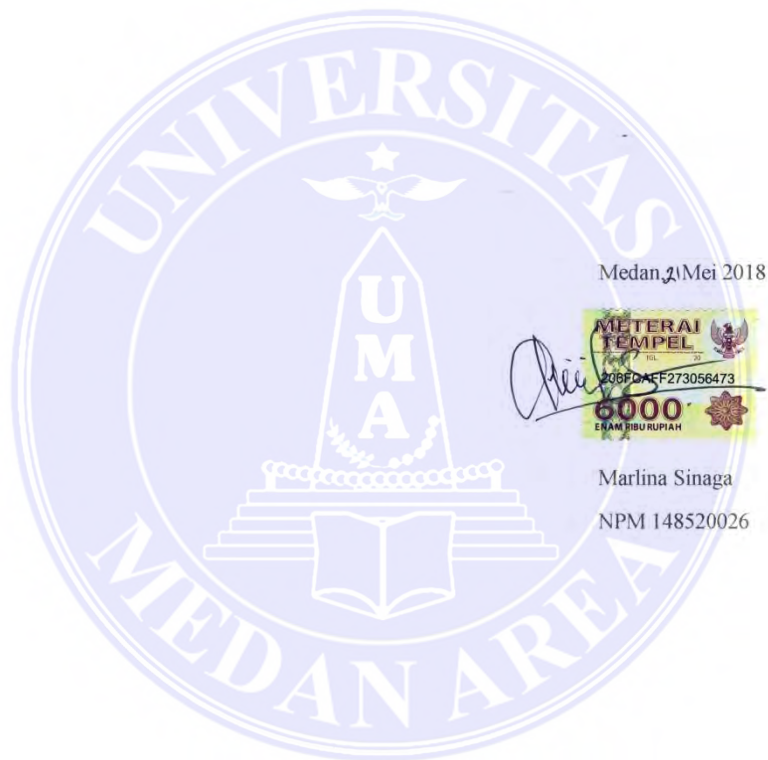


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

Di lingkungan masyarakat, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat dalam hal kesejahteraan hal ini peranan pemerintah yang masih kurang tepat sasaran. dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat seharusnya setiap pemerintah memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sangat di harapkan untuk meningkatkan mutu kualitas kinerja pemerintah yang lebih bertanggung jawab sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana peranan UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana UPK PNPM Mandiri menjalankan program SPP di Kantor UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini di lanjutkan dengan menganalisa data yang di peroleh, maka hasilnya yaitu peranan UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kantor UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dikatakan baik. Dapat dilihat dengan peran UPK PNPM Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan standar alur prosedur .

Kata kunci: Peranan, UPK, PNPM Mandiri, Kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

ABSTRACT

In the community there are still many public complaints in terms of the role of government, which is still not well targeted by carrying out duties and responsibilities to the community should every government have the ability to further improve the quality of service. As determined by the government agencies in the district pangururan Samosir district is expected to improve the quality of the government's more responsible performance as by the government in serving the community. In this case formulation of the formulation of the problem is how the role unit manager activities (upk) pnpm independent in improving the welfare of society through savings and loan lending as for the purpose of this study is to find out how upk pnpm independent office in pangururan district samosir district. The method in this research is qualitative by using technique of observation, interview and documentation based on the result is this study followed by analyzing the data obtained, then the result is the role of independent upk pnpm in improving the welfare of the community in the district pangururan samosir district can be said either. Seen from the progress of members of the spp group as well as, the role of independent pnpm upk corresponding to the soup.

Role keywords: role, upk, independent pnpm community welfare

KATA PENGANTAR

Segala pujian syukur dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan atas kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Skripsi yang berjudul: “Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”.

Penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan terwujudnya skripsi ini, adapun tujuan ini ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua penulis “Bapak dan Alm Mama” yang telah membesarkan, menasehati, membimbing, dan mendidik penulis sejak kecil tanpa kenal lelah. Serta yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan penulis.
2. Saudara perempuan penulis Hermina Sinaga yang telah mendukung dan membiayai uang kuliah Penulis dan kebutuhan penulis selama kuliah.
3. Bapak Prof. Dr.H.M. Arif Nasution MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Bapak Drs. Usman Tarigan MS selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra Hj Rosmala Dewi M.Pd selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan selaku ketua Prodi Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Nasrullah Hidayat S.Pd, M.Sc selaku sekretaris penulis.
7. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Medan Area.
8. Buat sahabat penulis Rohani, Yanti, Dipa, Lidya, Mimi, Ima, Nova, Putri, Lena, Wiwik, Ririn, Dian, Riduan, winda, Dll. yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya kagumi.
9. Teman-teman se-Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Buat para senior-senior Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang memberikan saran dan dukungannya.
11. Bapak dan Ibu UPK PNPM Mandiri yang telah memberikan informasi buat penulis.
12. Serta masyarakat yang telah bersedia membantu penulis.

Dengan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis nantikan dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terimakasih buat semuanya.

Medan, April 2018

Hormat Penulis

Marlina Sinaga



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 11 Tinjauan Pustaka	6
2.1 Pengertian Peranan	6
2.2 Unit Pengelola kegiatan (UPK).....	8
2.2.1 Penataan Organisasi (UPK).....	9
2.2.2 Tujuan Penataan (UPK)	9
2.2.3 kebijakan Penataan (UPK)	9
2.3 Tugas UPK PNPM Mandiri	10
2.4 PNPM Mandiri.....	10
2.4.1 Prinsip dasar PNPM Mandiri	12
2.4.2 Cara kerja PNPM Mandiri.....	13
2.5 Program PNPM Mandiri	13
2.6 Ruang Lingkup PNPM Mandiri.....	15
2.7 Pemberdayaan Masyarakat	15
2.8 kelompok Swadaya Masyarakat	19
2.9 kesejahteraan Masyarakat	21
2.9.1 kesejahteraan dalam Bidang Ekonomi	23
2.9.2 kesejahteraan Bidang Sosial	24
2.9.3 kesejahteraan bidang lingkungan	24

2.10 Program atau Kebijakan.....	24
2.11 konsep Pembangunan.....	25
2.12 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB 111 METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian.....	29
3.1.1 Jenis Penelitian.....	29
3.1.2 Sifat Penelitian	30
3.1.3 Lokasi Penelitian	30
3.1.4 Waktu Penelitian	30
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3 Metode Analisis Data.....	33
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.....	35
4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Pangururan.....	36
4.1.2 Batasan Kecamatan Pangururan	36
4.1.3 kependudukan	36
4.2 Sejarah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri.....	38
4.3 Struktur Organisasi	39
4.4 Fungsi Pengurus-pengurus UPK Secara Umum	41
4.5 Tugas- Tugas Pokok Dari Pengurus UPK	42
4.5.1 Ketua BKAD.....	42
4.5.2 Ketua UPK	43
4.5.3 Sekretaris.....	44
4.5.4 Bendahara.....	44
4.5.5 Anggota 1 UPK	45
4.5.6 Anggota 11 UPK	45
4.5.7 Anggota 111 UPK	45
4.6 Pembahasan Penelitian.....	47
4.6.1 Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Terbentuknya UPK	47
4.6.2 Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri	49
4.6.3 Program kegiatan UPK PNPM Mandiri	50
4.6.4 Mengelola Keuangan	52

4.6.5 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	60
4.6.6 Pengawasan Program UPK PNPM Mandiri.....	63
4.6.7 Sasaran Utama UPK PNPM Mandiri	64
4.6.8 Faktor Pendukung dan Penghambat UPK PNPM Mandiri	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jadwal dan Waktu Penelitian	29
Tabel 2 Hasil Observasi	30
Tabel 3 Nama Desa/Kelurahan	36
Tabel 4 Laporan operasional UPK.....	44
Table 5 Hasil Laporan SPP..	52



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Karangka Pemikiran	25
Bagan 2 Struktur Organisasi UPK PNPM Mandiri	38
Bagan 3 Struktur Alur SPP	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan potensi sumber daya alam dan mempunyai sumber daya manusia yang cukup beragam suku bangsa, Indonesia juga banyak memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi, yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena maju dan berkembangnya suatu negara itu terletak pada kesejahteraan masyarakat kota maupun desa, dengan membangun suatu desa berarti telah membangun sebagian besar masyarakat Indonesia.

Unit pengelola kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Secara umum UPK PNPM Mandiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UPK juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan Pangurusan, serta pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan pelestarian PNPM Mandiri pedesaan bersama dengan pelaku lainnya atau masyarakat setempat.

Dengan adanya peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan petunjuk operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, PTO beserta penjelasannya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan dana bergulir bagi masyarakat yang dikelola oleh UPK.

Kementerian dalam Negeri melalui direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan PNPM Mandiri pedesaan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan dikarenakan pertama, efisiensi pembiayaan program dapat dicapai, kedua, adanya partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran, dan ketiga, adanya pemilihan bagi kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 pada undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membentuk pelayanan sosial dan/atau seseorang yang berkerja baik di dalam lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri merupakan program pemerintah untuk mengelola sumber dana keuangan desa untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun pendidikan.

Dengan adanya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah secara mandiri. Daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi secara nyata, luas dan bertanggung jawab, hal ini dapat membuat daerah lebih fokus dalam membangun daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat di desa tersebut.

Dengan adanya Peranan UPK PNPM Mandiri diharapkan dapat membantu masyarakat di kecamatan Pangururan agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir untuk dijadikan sebuah pemicu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta demi kemajuan di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang lebih maju lagi.

Adapun peranan unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih memiliki hambatan dalam pencairan dana desa, serta faktor lainnya sehingga dalam menjalankan unit

pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi terhambat sehingga banyaknya kegiatan yang terkendala. Sesuai dengan konsep Tridaya PNPM Mandiri yaitu:

1. Perlindungan lingkungan
2. Pengembangan masyarakat dan
3. Pengembangan ekonomi

Diharapkan masyarakat mampu untuk mengembangkan dalam bidang lingkungan sosial masyarakat dan bidang ekonomi.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **Peranan unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.**

1.2 Perumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi dan sudah dibatasi, maka akan dirumuskan masalah sesuai dengan judul skripsi. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat UPK PNPM Mandiri?

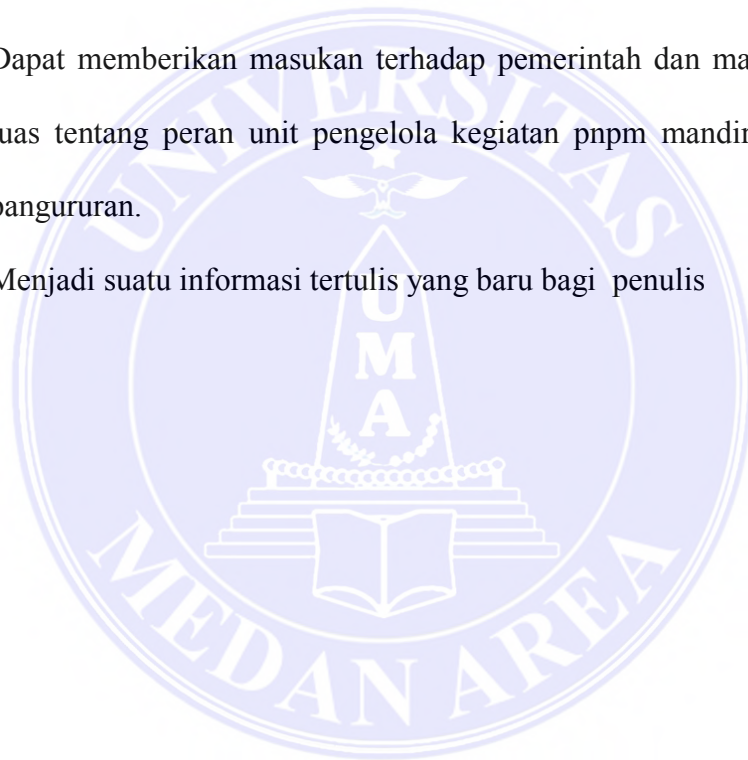
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan masyarakat secara luas tentang peran unit pengelola kegiatan pnpm mandiri di kecamatan pangururan.
2. Menjadi suatu informasi tertulis yang baru bagi penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian peranan

Peran berasal dari kata peran, yang menurut “ kamus besar bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (Flim), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditunjukkan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan atau organisasi, maka perana berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki organisasi yang berkedudukan didalam masyarakat.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Soekanto (1982:237) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lainnya begitu juga sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Ralph linton, dalam Soekanto (1982:237).

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia

mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekitarnya Ely chinoy dalam Soekanto (1982:238)

Menurut Levinson dalam Soekanto (2003:243) mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat. Sedangkan menjalankan setiap lembaga selalu dilakukan oleh pengurus. Dan tiap-tiap orang mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok masyarakatnya.

1.2 Unit Pengelola kegiatan (UPK)

Unit pengelola kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasi pertemuan-pertemuan di kecamatan, secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri, di antaranya sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM yang bersifat keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM.
7. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/Musyawarah Antar Desa (MAD).
8. Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
9. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD).
10. Melakukan bimbingan teknis.

2.2.1 Penataan organisasi UPK

Penataan UPK dilokasi kecamatan PNPM Mandiri pedesaan dilakukan bertujuan:

1. Memenuhi tuntutan evaluasi kinerja program (PNPM Mandiri pedesaan) sehingga UPK dapat menjaga akuntabilitas pengelola kegiatan secara bertahap menciptakan keberlanjutan dan kemandirian organisasi.
2. Melaksanakan misi perluasan usaha simpan pinjam kelompok di desa dan antar desa sehingga potensi-potensi lokal dapat dikembangkan melalui penyediaan modal pinjaman yang terjangkau. Untuk itu seluruh fungsi (tugas dan peran, kewajiban dan tanggung jawab serta hak-hak) dalam organisasi UPK harus dijabarkan dalam standar operasional dan prosedur (SOP) secara jelas dan dapat dievaluasi secara periodik dari waktu ke waktu.

2.2.2 Tujuan penataan UPK

Untuk memperkuat legalitas operasional UPK agar mampu melaksanakan dan mengembangkan diri sebagai pengelola keuangan dan dana bergulir, pelaksanaan program dalam kaitan fungsi pembangunan partisipatif, serta penguatan dan pembinaan kelompok simpan pinjam.

2.2.3 Kebijakan penataan UPK

Dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan UPK kedepan, maka kebijakan yang diambil pemerintah adalah status kepemilikan aset yang dikelola UPK adalah milik masyarakat. Sumber aset ini pada awalnya berasal dari dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan. BLM pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

bukan kepada perorangan termasuk BLM yang dimanfaatkan untuk kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah juga milik masyarakat.

2.3 Tugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh unit pengelola kegiatan pnpm mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan lingkungan (melakukan perbaikan) jalan
2. Kegiatan sosial simpan pinjam perempuan (SPP), pendidikan dan kesehatan.
3. Kegiatan ekonomi (membantu menciptakan usaha)

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan campur tangan semua pihak secara bersama terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini berkelanjutan. Peran usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Untuk itu diperlukan perubahan yang terarah dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. (Tim pengendali (TP) PNPM, 2007:19). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri

dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah perdesaan.

Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan. PNPM Mandiri perdesaan ini menjadi dan telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui program pengembangan kecamatan (PPK).

Pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan berada dibawah pembinaan direktorat pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) dan departemen dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan (PKK) yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1998.

Program nasional pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan pada kegiatan masyarakat serta menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

2.4.1 Prinsip dasar PNPM Mandiri

1. Transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelola kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan dan direncanakan secara terbuka serta dipertanggung jawabkan.

2. Desentralisasi.

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai kapasitasnya.

3. Keberpihakan pada orang atau masyarakat yang kurang mampu setempat.

4. Prioritas usulan, pemerintah harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengatasi kemiskinan.

5. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

6. Otonomi.

Masyarakat diberikan kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

2.4.2 Cara kerja PNPM Mandiri

PNPM Mandiri di nilai sebagai program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Program ini menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan desa, program ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di perdesaan, serta peningkatan kapasitas mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, penentuan jenis kegiatan, proses pelaksanaan, pengelola kegiatan dan dana. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui upaya tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi
2. Proses partisipatif pemetaan rumah tangga miskin (RTM) dan pemetaan sosial
3. Perencanaan tingkat dusun, desa dan kecamatan
4. Masyarakat melakukan kegiatan mereka
5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan

2.5 Program PNPM Mandiri

PNPM melakukan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. PNPM–inti: terdiri dari program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DT.
2. PNPM- penguatan: terdiri dari program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian

target tertentu. Pelaksanaan program-program di tingkat komunitas mengacu pada kebijakan PNPM Mandiri.

Adapun rangkaian komponen program pemberdayaan dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat, mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendamping masyarakat serta fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat diwilayahnya.
2. Bantuan langsung masyarakat (BLM), dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal.
4. Bantuan pengelola dan pengembangan program yang meliputi kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kerlompok lainnya dalam pengelola kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

2.6 Ruang lingkup PNPM Mandiri

Pada dasarnya kegiatan pnpm mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi:

1. Penyediaan dan perbaikan pasaran atau sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diperhatikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hogan (2000:20) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus, yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/ empowering experiences*).

2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindak berdayaan (*discuss reasons for depowerment/ empowerment*)
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*)
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimple mentasikan (*develop and implement action plans*)

Shardlow (1998:32) pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan biestek (1961) yang dikenal dengan kesejahteraan sosial dengan nama '*self-Determination*'.

Meskipun demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang pendidikan ataupun dibidang sosial. Misalnya: tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil, pada bidang pendidikan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada didalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial, misalnya: agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat
2. Bantuan langsung masyarakat (BLM)
3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal
4. Bantuan pengelola dan pengembangan program

Menurut Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, *Three Models Of Community Organization Practice* (1998), paradigma ini merupakan format ideal yang berguna dalam memahami konsep PM dengan tiga model antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif secara inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial mampu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “Tujuan proses”. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan

tersebut pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat.

2. Perencanaan sosial , menunjukan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran kenakalan remaja , kebodohan (buta huruf) kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup). Tingginya angka kematian bayi, kekurangan gizi dll. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, yatim piatu, wanita tuna sosial. Pekerjaan sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau sebagai penerima layanan (*beneficiaries*). Keterlibatan para penerima layanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, keputusan yang dilakukan oleh para pekerja sosial dilembaga-lembaga formal (LSM). Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (*expert*) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan sosial.
3. Aksi sosial, yang tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber

(*distribution of resources*), dan pengembangan keputusan (*distribution of decision making*). pendekatan aksi sosial didasari pada pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi “korban” ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi pemerataan (*equality*) dan keadilan (*quality*).

2.8 Kelompok Swadaya Masyarakat

Dalam strategi intervensi PNPM Mandiri untuk mendorong terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat, dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan pada akhirnya madani, dilakukan melalui pendampingan dan pembelajaran kepada masyarakat melalui pendekatan kelompok.

Pendekatan kelompok digunakan dengan tujuan terjadinya proses saling belajar, membangun kebersamaan, saling peduli dan saling memahami di antara anggota. Proses saling belajar bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi juga agar bisa berbagi nilai-nilai positif, sesuai dengan namanya prinsip pemberdayaan, kelompok masyarakat yang paling baik adalah kelompok yang memang lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri,

dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan terutama sumber daya yang ada di masyarakat tersebut.

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama.

Sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama-sama, terwujudnya kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berdaya dan mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan permersatuan sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran pertumbuhan pada kelompok.
2. Masyarakat memahami tujuan KSM nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM.
3. Kelompok masyarakat yang bersepakat yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya.
4. Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam pengembangan modal sosial.
5. Berfungsinya aturan main tanggung jawab dan keswadayaan modal, dll.

Yang sesuai dengan ketentuan umum pelaksanaan kegiatan Tridaya antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan lingkungan

Dimana kegiatan lingkungan ini sangat berguna bagi masyarakat untuk dikembangkan, karena masyarakat bisa saling membantu satu sama lain misalnya kegiatan: gotong royong yang dilakukan maksimal 1 x 1 bulan.

2. Kegiatan sosial

Kegiatan sosial ini sendiri dilakukan untuk memaksimalkan dari kegiatan kegiatan lingkungan

3. Kegiatan ekonomi

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu membentuk suatu kelompok dan membuat suatu program kerja seperti industri kecil (rumahan) contohnya: membuat usaha keripik singgkong.

2.9 Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahteraan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1976) adalah suatu keadaan yang saman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan tercipta kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah layak huni, tercukupinya kebutuhan sehari-hari yaitu sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat, pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ke tiga memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan di batasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahteraan.

Pada umumnya kesejahteraan mempunyai tiga konsepsi yaitu:

1. kondisi kehidupan atau keadaan masyarakat sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
2. Institusi, kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau suatu usaha yang terorganisir untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahan untuk mencapai kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapat yang nanti mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu: adat-istiadat, keadaan iklim dan alam sekitarnya, serta ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda.

2.9.1 kesejahteraan dalam bidang ekonomi

Kesejahteraan dalam bidang ekonomi dimana masyarakat mempunyai suatu perekonomian yang baik, kesejahteraan dalam ekonomi mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan

ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Adapun kegiatan bidang ekonomi adalah: simpan pinjam perempuan (SPP)

2.9.2 kesejahteraan bidang sosial

Merupakan suatu kondisi yang sejahtera baik dalam jasmani maupun rohani dan kesehatan. Yang mengacu pada keseluruhan status nilai guna bagi masyarakat. Adapun jenis kegiatan bidang sosial adalah bantuan kesehatan.

2.9.3 kesejahteraan bidang lingkungan

Dimana lingkungan masyarakat yang baik bebas dari bencana alam, seperti banjir, longsor dan lainnya, serta adanya jalan yang baik dan mulus untuk dilewati masyarakat. Adapun kegiatan di bidang lingkungan ini adalah: pembangunan jalan dan drainase di daerah tertentu yang telah ditentukan untuk diperbaiki.

2.10 Program atau kebijakan

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan kegiatan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh seorang pemimpin yang telah di rundingkan terlebih dahulu. Berdasarkan pendapat Dwidjowijono (2003:57) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis, dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi.

Upaya kebijakan untuk membangun desa antara lain dengan menerbitkan undang-undang Desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memprioritaskan percepatan pembangunan daerah atau pedesaan. Dengan hadirnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pemerintah Jokowi dimana desa bias diberdayakan menjadi kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera.

Kementrian desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan Undang-undang Desa dan Nawacita, sekaligus menghadapi dan mengatasi tantangan pelaksanaan Undang-undang Desa.

2.11 Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dan dapat pula diartikan sebagai tranformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah lebih atau yang diinginkan.

Menurut Siagian (2009: 4-5) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkain usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation – building*). Berdasarkan definisi tersebut terdapat 7 ide pokok yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkain kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu yang tanpa akhir (*never ending*)
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam, arti jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk berkembang dan perubahan mengandung makna suatu Negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu ke jangka waktu lain.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas ini dapat diartikan diantara lain sebagai cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Medernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefenisi bersifat multidimensional.
7. Usaha pembinaan bangsa.

Pembangunan adalah proses yang multidimensi, yang mencakup dimensi ekonomi maupun perubahan kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. *Development* (pembangunan) adalah proses perbaikan kualitas segenap bidang kehidupan manusia.

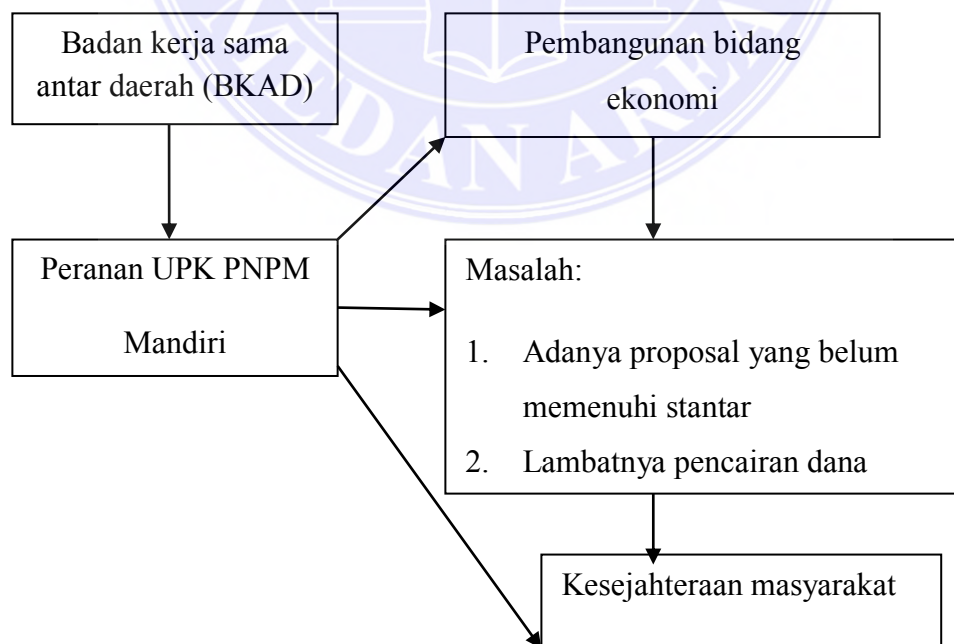
Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat atau bangsa meningkat dalam jangka panjang, jadi dalam pengertian dasar terdapat tiga unsur penting dalam pengertian pembangunan ekonomi yaitu:

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terus menerus.
2. Usaha dan keberhasilan menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu berlangsung terus menerus dalam jangka panjang.

2.12 kerangka pemikiran

Dalam skripsi ini penulis membuat kerangka pemikiran dalam bentuk seperti pada Bagan 1 di bawah ini:

Bagan.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikelola oleh penulis di kantor upk

Dengan adanya visi dan misi Presiden sekaligus kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh presiden pada rapat perdana cabinet kerja, Tanggal 27 oktober 2014 visi dan misi presiden diterjemahkan dalam sasaran strategis prioritas (NAWACITA) pada point ketiga menyatakan "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" (dalam paparan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia di unduh <http://www://. Paparan Dirjen PD Tu Kemen desa-Rakorna skominfo 2015. pdf>.

Dalam hal pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui kebijakan atau program-program yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan berbagai kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Pengawasan pelaksanaan Undang-undang desa khususnya untuk membangun desa. Peranan UPK PNPM Mandiri akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan desa serta menjalankan program UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif yang berfokus kepada peranan unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sugiyono (2016 : 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melihat pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif/induktif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2015:21) karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

3.1.2 Sifat Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:11) metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri di Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah menentukan jadwal sesuai dengan yang tertera pada Tabel.1 Berikut ini:

Tabel. 1
Jadwal dan waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt-17				Nov-17				Des-17				Jan-18				Feb-18				Mar-18				April-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Seminar Proposal																												
3	Perbaikan Proposal																												
4	Penelitian																												
5	Penyusunan Skripsi																												
6	Seminar Hasil																												
7	Perbaikan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Tabel. 2 Hasil observasi

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Keuangan	Dengan kondisi keuangan yang stabil UPK PNPM Mandiri harus mengelola keuangan yang ada dengan baik dan benar.
2	Simpan pinjam perempuan	Dengan adanya sumber keuangan yang stabil UPK PNPM Mandiri mampu menjalankan program SPP dengan baik dan terarah, serta masyarakat di Kecamatan Pangururan dapat terbantu dan lebih mandiri untuk mengembangkan atau meningkatkan perekonomian masing-masing.

Sumber: kantor UPK PNPM Mandiri Kecamatan Pangururan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan data dan sumber data yang pembandingan data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan *cross check*, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari teknik pengumpulan data tersebut maka penelitian yakin dengan kepercayaan data dikumpulkan (Lexy J. Maleong 2009:330).

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Haberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan). Sugiyono (2007:345).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data biasanya dalam membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. Penarik kesimpulan (*conclusion drawing verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Adi Rukminto Isbandi . 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Dalam Negeri 2007. *PTO PNPM-MP*. Jakarta: Tim koordinasi PNPM-MP.

Dwidjowijoyo, Riant N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Public Policy)*. Jakarta: Elek Media Komputindo

Kadir, Abdul: 2012. *Pengantar Teori Pembangunan*. Medan, Pustaka Bangsa Press

Nugroho, Iwan. 2012. *Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial*

Siagian, Sondang P. 2009. *Adminstrasi pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosilogi suatu pengantar*. Jakarta: CV Rajawali Pers

Sugiyono. 2006 *.Metode penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta Jakarta Erlangga

———. 2016. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung

Tangkilisan (2003:2). *Konsep kebijakan publik*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Arah kebijakan Bidang Desa dalam
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

Alamat we-site:

<http://www.mizibur.com> . (diakses, 11 Januari 2014, Pukul 11.00 WIB)

<http://m.elshintacom.com>. (diakses, Senin 13 Februari 2017, Pukul 21:34 WIB)

<http://googleweblight.com>. (diakses, Jumat 28 Agustus 2015, Pukul 13:36 WIB)

<http://pnpmtamanrajo.wordpress.com>. (diakses, senin 25 Oktober 2010, pukul
16:31 WIB)

http://id.wikipedia.org/wiki/pnpm_mandiri_pedesaan. (diakses, Rabu 1 Maret 2017,
Pukul 09:47)

skripsi:

Marpaung, Okti Kelya Dita. 2017. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur
desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kec.
Angkola. Skripsi Fisip Universitas Medan Area

Eliyanti. 2012. Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtaya Kabupaten Serang. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

KETUA BKAD KECAMATAN PANGURURAN

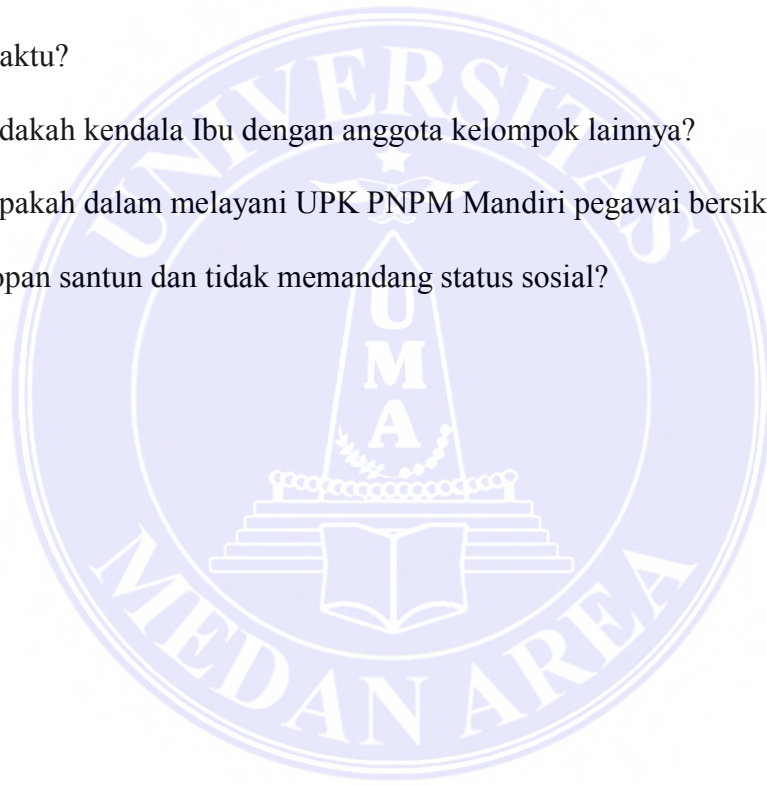
1. Bagaimana menurut Bapak peranan UPK PNPM Mandiri di kecamatan Pangururan saat ini ?
2. Sejauh mana kegiatan UPK PNPM Mandiri berkembang sampai saat ini ?
3. Apakah dalam pengawasan yang Bapak hadapi sering terjadi kemacetan pencairan dana bergulir?
4. Bagaimana menurut Bapak Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ?

KETUA UPK PNPM MANDIRI DAN ANGGOTA LAINNYA

1. Bagaimana awal mulanya terbentuknya UPK ?
2. Bagaimana menurut Bapak perkembangan UPK PNPM Mandiri hingga saat ini?
3. Bagaimana peranan UPK PNPM Mandiri ?
4. Berapa banyak anggota Simpan Pinjam Perempuan?
5. Hambatan apa yang sering terjadi saat pelaksanaan sosialisasi?
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan masyarakat tentang SPP?
7. Bagaimana prosedur keanggotaan SPP?
8. Upaya apakah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
9. Dan berapa lama jangka waktu peminjaman yang ditargetkan UPK kepada kelompok peminjam?

MASYARAKAT/KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KECAMATAN
PANGURURAN

1. Bagaimana menurut Ibu setujuhkah ibu dengan program simpan pinjam perempuan ?
2. Bagaimana menurut Ibu informasi yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri?
3. Apakah dalam pencairan dana UPK selalu melakukan pencairan dana tepat waktu?
4. Adakah kendala Ibu dengan anggota kelompok lainnya?
5. Apakah dalam melayani UPK PNPM Mandiri pegawai bersikap ramah, sopan santun dan tidak memandang status sosial?



FASILITATOR UPK PNPM MANDIRI YANG LAMA

1. Bagaimana menurut Ibu perkembangan pengelola kegiatan SPP di kecamatan Pangururann hingga saat ini?
2. Ibu selaku Fasilitator yang lama dan sebagai anggota kelompok SPP kendala yang apakah yang pernah terjadi?
3. Dengan Ibu mengikuti SPP menurut Ibu adakah peningkatan perekonomian Ibu dan dana bergulir itu Ibu peruntukkan untuk apa?



LAMPIRAN 2

DATA-DATA INFORMAN

1. Nama : Ojak Malau
Jabatan : Ketua BKAD Pangururan
Waktu Penelitian : Jumat, 09 Februari 2018, Pukul 10:00 WIB
Tempat Wawancara : kantor UPK Pangururan
2. Nama : Hontal Sinurat
Jabatan : Ketua UPK PNPM Mandiri
Waktu Penelitian : Jumat ,09 Februari 2018, Pukul 11:30 WIB
Tempat Penelitian : Kantor UPK Pangururan
3. Nama : Roserna Manihuruk
Jabatan : Bendahara 1 Pangururan
Waktu Penelitian : Senin, 12 Februari 2018, Pukul 10:30 WIB
Tempat Penelitian : Kantor UPK Pangururan
4. Nama : Perawati Sitanggang
Jabatan : Sekretaris UPK Pangururan
Waktu Penelitian : Senin, 12 Februari 2018, Pukul 11:10 WIB
Tempat Penelitian : Kantor UPK Pangururan
5. Nama : Friska Yunita Simanjuntak
Jabatan : Fasilitator Lama dan Anggota SPP
Waktu Penelitian : Sabtu, 10 Februari 2018, Pukul 10:15 WIB
Tempat Penelitian : Jl Pintu Sona (Rumah) Pangururan

6. Nama : N. Simbolon
Jabatan : Masyarakat Anggota SPP
Waktu Penelitian : Rabu, 13 Februari 2018, Pukul 17:00 WIB
Tempat Penelitian : Jl. Pintu Sona (Rumah)
7. Nama : Sitanggang
Jabatan : Anggota SPP
Waktu Penelitian : Kamis, 14 Februari 2018, Pukul 18:10 WIB
Tempat Penelitian : Ari Ara Tolu (Rumah)
8. Nama : L. Boru Sipanyung
Jabatan : Anggota SPP
Waktu Penelitian : Sabtu, 10 Februari 2018, Pukul 18:10 WIB
Tempat Penelitian : Desa Situngkir
9. Nama : R. Boru Simbolon
Jabatan : Anggota SPP
Waktu Penelitian : Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 10:10 WIB
Tempat Penelitian : Onan Baru
10. Nama : Reni Boru Naibaho
Jabatan : Anggota SPP
Waktu Penelitian : Jumat, 15 Februari 2018, Pukul 14:00 WIB
Tempat Penelitian : Onan Baru (Rumah)

Dokumentasi



Gambar 1: Photo bersama dengan ketua BKAD, ketua UPK PNPM, Bendahara, sekretaris dan anggota TIM Verifikasi.



Gambar 2: photo bersama ketua UPK dan ketua BKAD



Gambar 3 bersama sekretaris UPK PNPM Mandiri kecamatan Pangururan.



Gambar 4 photo anggota kelompok swadaya masyarakat.



Gambar 5 pencairan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan .



Gambar 6 tempat informasi PNPM Mandiri



Gambar 7 Photo saat TIM Verifikasi mengadakan rapat sosialisasi pada masyarakat.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seflabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 064/FIS.2/01.10/1/2018

22 Januari 2018

Lamp : -

Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth, Ka. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri
Kecamatan Pengururan Kabupaten Samosir

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

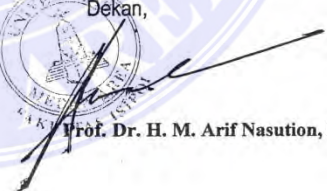
Nama : Marlina Sinaga
N P M : 148520026
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri, dengan judul Skripsi ***"Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir"***

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC : File,-



**BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
"MARSADA"
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR**
Jln. Raya – Simanindo Desa Saitnihuta



Pangururan, Februari 2018

Nomor : 04/BKAD/UPK/PGRN/II/2018
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan telah melaksanakan Riset

Kepada Yth :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Nomor : 064/FIS.2/01.10/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset di Kantor UPK Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Marlina Sinaga
NIM : 148520026
Jurusan : Administrasi Publik
Judul : Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPMPd dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Pangururan.
Lokasi Riset : Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Desa Saitnihuta Kec. Pangururan Kab. Samosir.

Benar telah melaksanakan Riset tentang *Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPMPd dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Pangururan Kab. Samosir.* selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 22 Januari 2018 s/d 22 Februari 2018 di Kantor UPK Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA UPK KEC. PANGURURAN

HUNTAL SINURAT